

**KEBERDAYAAN MASYARAKAT PETERNAK : SUATU PERSPEKTIF
SOSIOLOGI BERPARADIGMA FAKTA SOSIAL**

Nugraha Setiawan
Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran
Jatinangor Sumedang
e-mail: nugraha.unpad@yahoo.com

ABSTRAK. Tulisan ini bertujuan untuk memahami gejala keberdayaan masyarakat peternak di wilayah pedesaan Indonesia melalui pendekatan sosiologis. Analisis dilakukan dengan memakai paradigma "fakta sosial" yang memandang masyarakat sebagai kenyataan atau fakta yang berdiri sendiri terpisah dari individu, namun mempengaruhi individu tersebut, kemudian dikaji lebih jauh melalui pemahaman mengenai *force relations dengan memakai teori kekuasaan Foucault*. Hasil studi menunjukkan, telah sejak lama bahkan hingga saat ini, masyarakat peternak di pedesaan masih menjadi objek dan sasaran kekuasaan dari masyarakat kota maupun pranata-pranata dari luar wilayah pedesaan. Keadaan tersebut menyebabkan mereka makin terkungkung dalam kondisi tidak berdaya dalam kehidupan sosial-ekonominya.

Kata Kunci: keberdayaan, peternak, pedesaan, fakta sosial.

**THE POWER OF SMALL-SCALE CATTLE FARMERS : A SOCIOLOGICAL
PERSPECTIVE OF SOCIAL FACT PARADIGM**

ABSTRACT. The study was aimed at understanding of small-scale cattle farmers phenomenon in rural Indonesia through sosiological approach. Analysis was carried out by using "social facts" paradigm, which argues that society is external to, but coercive over, individuals. The phenomenon was further analyzed through understanding of force relations by using Foucault's theory of power. The study showed that the farmers have long been powerless, they are object and target of power of urban community and outside institutions. Such situation causes the farmers to be socio-economically powerless.

Keywords: power, small-scale cattle farmers, rural, social facts.

PENDAHULUAN

Sebagian besar penduduk Indonesia masih berada di pedesaan, dan sebagian besar penduduk pedesaan bermata pencaharian di sektor pertanian termasuk di dalamnya peternakan. Sebagai contoh, di Jawa Barat sebagai propinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, berdasarkan hasil Sensus Penduduk terakhir, angkatan kerja yang bekerja di sektor peternakan ada 161.926 orang, dari jumlah tersebut sebanyak 130.097 orang bertempat tinggal di daerah

pedesaan, sedangkan yang tinggal di perkotaan hanya 31.829 orang (Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2001). Berdasarkan data di atas dapat dihitung, peternak yang berdomisili di pedesaan proporsinya mencapai angka 80,3 persen.

Dalam menghadapi era globalisasi serta perdagangan bebas saat ini, para peternak akan berhadapan dengan sistem ekonomi pasar bebas, sehingga mereka yang tidak siap akan kalah dalam proses persaingan yang semakin ketat. Di sektor peternakan dan pertanian pada umumnya telah dilakukan antisipasi untuk menghadapi persaingan tersebut, misalnya arah kebijakan dan pembinaan telah diorientasikan pada upaya untuk membentuk petani peternak yang berorientasi pasar. Didirikannya badan dan lembaga yang mengurus agribisnis dan berbagai bentuk pembinaan lainnya seperti kegiatan penyuluhan yang diarahkan untuk membentuk petani peternak profesional, merupakan sebagian upaya untuk membentuk petani peternak yang diharapkan mampu bertahan dan berkembang dalam suasana persaingan di pasar bebas.

Namun demikian, ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan para peternak dalam menghadapi realitas usahanya, yaitu selain tergantung pada aspek kelembagaan yang telah dikembangkan, juga sangat dipengaruhi aspek individu peternak serta pengaruh dari sistem dan struktur sosial masyarakat. Misalnya, dalam penerapan sistem agribisnis peternakan akan sangat bergantung pada tingkat pemahaman peternak tentang sistem agribisnis dan karakteristik sosial budaya, seperti penolakan atau penerimaan mereka terhadap nilai-nilai kemodernan (Yunasaf, dkk. 1998).

Sebetulnya, upaya pemberdayaan masyarakat petani peternak di pedesaan sudah dilakukan sejak lama. Dalam empat dekade terakhir, pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan pembangunan pedesaan dan pembangunan pertanian. Secara ideal tujuan pembangunan tersebut diarahkan untuk mendukung ekonomi rakyat di pedesaan, namun pada pelaksanaannya proses pembangunan itu sering tidak sesuai dengan tujuan idealnya.

Mubyarto (1990) mensinyalir, pada awalnya ketidakberhasilan pembangunan pedesaan disebabkan adanya distorsi akibat "politik beras" dalam pembangunan ekonomi rakyat di wilayah pedesaan. Ukuran-ukuran keberhasilan pertanian menjadi berorientasi pada peningkatan produksi, bukannya pada perubahan struktur yang dapat memberdayakan masyarakat pedesaan. Sejalan dengan itu, pada proses pembangunan tersebut telah terjadi bias akibat *main stream yang* terlalu berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, sehingga orientasi pada sektor industri tetap lebih dominan.

Berdasarkan pada uraian di atas dapat dikatakan, hingga saat ini masyarakat pedesaan termasuk di dalamnya para peternak yang sebagian besar berada di wilayah pedesaan masih berada dalam kondisi kurang berdaya, bahkan masih tetap dalam keadaan tidak berdaya, baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, politik dan lain-lain. Tulisan ini akan menelusuri, mengapa para peternak serta umumnya masyarakat di pedesaan masih dalam keadaan tidak berdaya, padahal banyak

kebijakan-kebijakan pembangunan yang berorientasi ke pedesaan sudah sejak lama dibuat oleh pemerintah.

METODE

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah telaah bahan kepustakaan melalui pendekatan sosiologis. Pemahaman akan fenomena keberdayaan peternak di pedesaan dianalisis dengan menggunakan paradigma "fakta sosial", yang memandang hidup bermasyarakat sebagai sebuah makrostruktur (Ritzer, 2004, 2005). Kemudian dilakukan analisis lebih jauh dengan memakai teori kekuasaan dari Foucault, yang menyatakan bahwa dalam masyarakat kekuasaan bersifat imanen (Hewitt, 1991; Ritzer, 2005).

Dalam paradigma fakta sosial, masyarakat dipandang sebagai kenyataan atau fakta yang berdiri sendiri, terlepas dari persoalan apakah individu-individu menyukainya atau tidak menyukainya. Masyarakat dalam strukturnya, yaitu bentuk pengorganisasian, peraturan, hirarki kekuasaan, peranan-peranan, nilai-nilai, dan apa yang disebut sebagai pranata-pranata sosial, merupakan fakta yang terpisah dari individu, namun mempengaruhi individu tersebut.

Tulisan Emile Durkheim yang menerapkan paradigma fakta sosial menekankan corak obyektif hidup bermasyarakat (Veeger, dkk. 1992). Hidup sosial manusia adalah kenyataan yang berdiri sendiri, yang tidak mungkin dapat dipahami hanya berdasarkan ciri-ciri personal orang yang bersangkutan. Kehidupan sosial memiliki hukumnya, dampaknya, dan akibatnya sendiri. Durkheim tidak pula menyangkal bahwa hidup manusia yang bersifat tunggal dan utuh ikut ditentukan oleh ciri-ciri personal. Namun demikian, dia juga menegaskan bahwa kesosialan hidup merupakan unsur otonom yang setidaknya sama nyata seperti keindividualannya.

Hirarki kekuasaan sebagai sebuah fakta sosial, menurut Foucault terjelma karena adanya relasi-relasi kekuasaan (*force relations*), *adanya bentuk-bentuk* kekuasaan antara sumber dan sasaran kekuasaan (*the body*), *serta sasaran* kekuasaan (*the social body*). Fokus analisis dari pendekatan Foucault adalah pada *force relations*, sehingga dapat digunakan untuk mengkaji peranan dan dampak dari kekuasaan pada tingkat masyarakat. Pada perspektif ini, relasi kekuasaan berada pada keadaan yang mobil, artinya bahwa relasi kekuatannya bisa berubah-ubah tergantung pada siapa yang berkuasa dan siapa yang menjadi sasaran kekuasaan, namun kekuasaannya itu sendiri akan tetap ada dan tidak bisa dihindari atau dilenyapkan (Hewitt, 1991).

Pengkajian pada makalah ini menempatkan peternak sebagai bagian dari masyarakat pedesaan yang menjadi objek dari kekuasaan, dan yang menjadi penguasa adalah masyarakat atau pranata-pranata lain di luar wilayah pedesaan. Bentuk-bentuk kekuasaan antara penguasa dan sasaran kekuasaan dapat dalam bentuk penguasaan bidang politik, informasi, ekonomi, perdagangan, ataupun

yang lainnya, sehingga analisis dapat diarahkan untuk mengkaji peranan dan dampak kekuasaan tersebut.

Melalui pendekatan ini diharapkan dapat diketahui mengapa peternak sebagai bagian dari masyarakat pedesaan dalam keadaan yang tidak berdaya, walaupun pembangunan yang diarahkan ke pedesaan telah lama berlangsung. Diharapkan dengan diketahuinya duduk persoalan masalah di atas dapat dicari alternatif pemecahannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peternak Sebagai Anggota Masyarakat Pedesaan

Masyarakat pedesaan di Indonesia bisa dikatakan sebagai masyarakat petani, dan di dalamnya termasuk mereka yang berkecimpung di bidang peternakan. Walaupun telah terjadi pergeseran-pergeseran dalam sektor pekerjaan, basis utamanya masih didominasi oleh kegiatan pertanian (Setiawan, 2002). Masyarakat pedesaan yang agraris sering digambarkan sebagai masyarakat dengan budaya tertutup, berbudaya homogen, serta adanya dominasi ikatan tradisional dengan struktur supra desa yang bersifat feodal dan kolonial (Kuntowijoyo, 1993).

Adanya pandangan bahwa masyarakat pedesaan merupakan masyarakat tradisional yang konservatif, menurut Long (1992) telah menyebabkan adanya arus pemikiran yang menyatakan bahwa hal itu merupakan penghambat pembangunan nasional. Jadi, dalam konsep pemikiran tersebut bisa diartikan bahwa budaya masyarakat pedesaanlah yang menyebabkan terjadinya stagnasi pembangunan.

Terhadap pandangan di atas telah lama terjadi perdebatan, karena ternyata ada juga yang memiliki pemikiran, bahwa sebetulnya kawasan pedesaanlah yang mendukung perkembangan kota serta pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dalam pemikiran ini terbesit optimisme, dan bahwa konservatisme masyarakat pedesaan tersebut sebetulnya bukan merupakan masalah jika betul-betul berkehendak untuk membangun masyarakat pedesaan. Argumentasinya adalah bahwa budaya yang disebut sebagai penghambat itu justru dibentuk oleh kekuatan eksternal yang dengan sengaja semakin dikukuhkan. Dengan demikian, jika ingin berhasil membangun masyarakat di pedesaan, maka jangan menganggap konservatisme mereka sebagai suatu penghambat, apalagi dengan sengaja mereproduksinya.

Secara historis, pembentukan budaya petani seperti digambarkan oleh mereka yang sependapat dengan arus pemikiran pesimis, sebetulnya merupakan dampak dari adanya penindasan (*oppression*) dari luar. Pada masa feodalisme, golongan petani di pedesaan telah dipaksa untuk terus menerus memproduksi oleh golongan feodal kota dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonominya tanpa memberi imbalan yang cukup. Demikian pula pada zaman kolonial dengan sistem kapitalismenya, ternyata telah mengeksploitasi mereka tanpa memberi keuntungan yang memadai bagi para petani dan masyarakat pedesaan lainnya (Soetrisno, 1983).

Keadaan seperti digambarkan di atas ternyata terus berlangsung hingga setelah zaman kemerdekaan. Kartodirdjo (1979) mensinyalir bahwa revolusi hijau telah berdampak pada adanya kecenderungan ke arah polarisasi di beberapa daerah, dan kondisi demikian telah semakin menekan kehidupan para petani kecil. Bahkan, tekanan-tekanan tersebut dirasakan pula oleh anggota masyarakat pedesaan lainnya, termasuk para peternak yang sebagian besar mendiami wilayah pedesaan.

Di sisi lain, Lubis (1990) melihat bahwa pembangunan pertanian dan pedesaan sebetulnya tidak ditujukan untuk membina petani atau masyarakat pedesaan, tetapi lebih ditekankan untuk mengejar program swasembada beras. Para petani dipaksa untuk memproduksi beras sebanyak-banyaknya, sehingga menyebabkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan terabaikan. Hipotesis Lubis adalah bahwa dalam pembangunan pertanian, selain mempertimbangkan variabel ekonomi, perlu pula mempertimbangkan variabel non-ekonomi, sebab variabel non-ekonomi memainkan peranan yang sangat nyata dalam perkembangan ekonomi. Masalah sosial budaya diduga sangat besar pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi pedesaan.

Selanjutnya, Soetrisno (1983) mengemukakan bahwa masyarakat petani di pedesaan terus mengalami perubahan ke arah suatu masyarakat yang semakin tertutup, baik secara ekonomi, sosial budaya, maupun sistem pengelolaan pertaniannya. Terjadinya perubahan-perubahan itu merupakan hasil interaksi yang terus menerus dengan masyarakat lain terutama dengan masyarakat serta institusi yang telah mengeksploitasi mereka. Hal demikian menyebabkan semakin sulitnya sebagian besar masyarakat pedesaan yang terdiri atas petani dan peternak miskin untuk berpartisipasi dalam sistem perekonomian maupun dalam sistem produksi pertanian yang diintroduksi dari luar.

Dalam pengamatan Scott (1993) sebagai orang yang banyak mengkaji masyarakat petani di pedesaan negara-negara berkembang, kondisi-kondisi seperti digambarkan di atas yang menyebabkan keterpurukan para petani di desa, jika dibiarkan akan menumbuhkan jiwa perlawanan secara tidak langsung. Misalnya terhadap program atau kebijakan pemerintah, jika mereka telah pernah merasa diperlakukan tidak adil dan perlakuan tersebut berulang-ulang, maka mereka akan menjadi masyarakat yang apatis dan tidak peduli terhadap apa saja yang berkaitan dengan program dan kebijakan pemerintah.

Selanjutnya, Scott (1994) mengemukakan bahwa adanya deraan yang terus menerus terhadap masyarakat tani di pedesaan yang sudah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda telah menciptakan situasi subsistensi dengan moral ekonominya yang khas. Moral ekonomi "*risk averse*" atau *takut menanggung resiko*, dan "*safety first*" atau *dahulukan selamat, menjadi penyebab masyarakat pedesaan selalu terkungkung dalam kemiskinan*. Sebab yang penting bagi mereka bagaimana caranya dapat menafkahi keluarga agar hari ini dapat makan, bukan berusaha meningkatkan hasil usahatani dan usaha ternak mereka. Pada benak mereka, meningkatkan usaha berarti perlu pengorbanan yang dirasakan terlalu

berat, dan jika menemui kegagalan maka akan merupakan bencana bagi seluruh keluarganya.

Relasi Kekuasaan Antara Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan

Selain hal-hal yang diuraikan di atas, menurut Twikromo (1993) ada persepsi dari masyarakat kota yang dianggap modern, tentang etos kerja masyarakat pedesaan yang dikategorikan "inferior". Misalnya sebagai masyarakat yang tidak efisien, malas, tidak teratur, tidak tepat waktu, sulit dipahami, tidak mau bekerja sama, dan selalu berpandangan ke masa lalu. Penilaian rendah terhadap etos kerja masyarakat pedesaan pada gilirannya berubah menjadi mitos, dan dengan tumbuhnya mitos seperti ini, posisi masyarakat pedesaan menjadi lemah sehingga setiap kegagalan pembangunan atau kesalahan penerapan kebijakan-kebijakan pemerintah selalu ditimpakan pada masyarakat pedesaan.

Dari uraian yang ditulis sebelumnya tersirat, bahwa dalam relasi kekuasaan, masyarakat pedesaan berada pada posisi yang tidak punya kekuasaan dan tidak berdaya, sementara yang selalu berposisi sebagai penguasa antara lain masyarakat kota, ekonomi perkotaan, lembaga perdagangan kota, budaya urban, serta institusi pemerintah sebagai kepanjangan tangan dari kekuasaan birokrasi. Kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, dan prasangka, nampak sangat berpengaruh terhadap pengukuhan posisi petani peternak di pedesaan sebagai masyarakat yang tidak berdaya serta tidak memiliki kekuasaan. Mereka juga bisa dikatakan tidak pernah memiliki kekuatan tawar menawar untuk mengubah kondisi ketidakberdayaannya.

Ketidakberdayaan dan ketidakkuasaan masyarakat pedesaan untuk mengubah tekanan kekuasaan eksternal, secara historis telah terbentuk sejak zaman feodal. Adanya kepentingan-kepentingan ekonomi dari masyarakat feodal kota, yang dikuatkan melalui saluran-saluran politik dengan sanksi-sanksi tertentu telah menimbulkan rasa takut, yang dimanifestasikan dengan kepatuhan sebagai upaya untuk menghindari kesulitan-kesulitan yang mungkin akan dihadapinya.

Sementara itu, menurut Kartodirdjo (1979) ada kecenderungan dari penguasa untuk mempertahankan kedudukannya dalam struktur sosial dan nilai-nilai yang mendasari kepentingannya. Misalnya, dalam pola organisasi yang bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup rakyat, sering ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan dari orang-orang, kelompok-kelompok, ataupun institusi-institusi yang terlibat di dalamnya. Penyebab dari hal ini diduga karena keterlibatannya tidak didasari oleh motivasi dan komitmen yang kuat untuk menyejahterakan rakyat, namun lebih dilandasi oleh kepentingan-kepentingan individual maupun kelompoknya, serta dalam rangka melegitimasi kekuasaannya. Di sisi lain, masyarakat pedesaan yang ada dalam posisi tidak berdaya dan tidak memiliki kekuasaan akan makin terjerembab ke dalam kedudukan yang semakin sulit, sehingga tidak bisa ke luar dari kungkungan sebagai masyarakat yang tidak berdaya dan tidak memiliki kekuasaan.

Terjadinya pergantian penguasa dari era feodalisme, kolonialisme dan kapitalisme penjajah, dan bahkan setelah zaman kemerdekaan pada era pemerintahan Soekarno, Soeharto, hingga era pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono, rupa-rupanya tidak mengubah posisi petani peternak sebagai masyarakat yang tidak punya kekuasaan. Cara pengukuhan kekuasaan cenderung semakin kompleks, terutama pada masa pemerintahan Soeharto, yang sering dianggap hanya menempatkan masyarakat pedesaan sebagai obyek pembangunan semata.

Dalam konteks ini, Tjondronegoro (1990) mengemukakan bahwa kepentingan-kepentingan politik pemerintah Soeharto, sering dengan sengaja diarahkan untuk mempertahankan prinsip "massa mengambang". Hal demikian telah berpengaruh terhadap ketakutan masyarakat pedesaan untuk berorganisasi sehingga potensi masyarakat desa tidak terlatih untuk mengembangkan dan menolong dirinya sendiri.

Tepat pula kiranya apa yang digambarkan oleh Kartodirdjo (1979), bahwa pada akhirnya masyarakat pedesaan paling tidak memiliki dua sindrom, yaitu sindrom kemiskinan dan sindrom inersia yang saling kait mengait. Sindrom inersia yang antara lain berupa pasivisme, fatalisme, berorientasi ke dalam (lokalit), patuh "buta", penuh ketergantungan, dan *nrimo, merupakan gambaran yang terbentuk* sebagai dampak dari adanya intervensi kekuatan eksternal.

Petani Peternak Sebagai Subyek Pembangunan

Adanya persepsi terhadap masyarakat pedesaan yang memiliki sindrom inersia seperti yang digambarkan Kartodirdjo menyebabkan kesalahpahaman dalam menerapkan kebijakan pemerintah, yang terefleksi dengan selalu dijadikannya masyarakat pedesaan sebagai obyek pembangunan, bukannya sebagai subyek. Kesalahpahaman secara terus menerus telah menyebabkan tidak adanya perubahan posisi masyarakat pedesaan sebagai masyarakat yang tidak berdaya dan tidak memiliki kekuasaan. Hal ini telah menyebabkan mereka semakin apatis serta kehilangan semangat kerja.

Sikap yang semakin melekat pada masyarakat pedesaan seperti para petani peternak yang banyak berdiam di pedesaan, menurut Ellis merupakan hambatan budaya yang dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan sosial. Dalam hal ini, kemiskinan sosial merupakan suatu konsep dari ketiadaan akses masyarakat terhadap berbagai jaringan sosial dan struktur yang mendukung untuk meraih kesempatan-kesempatan guna meningkatkan produktivitasnya (Effendi, 1993).

Menempatkan masyarakat pedesaan pada posisi sebagai subyek pembangunan, menurut pendirian Twikromo (1993) pada akhirnya dapat melahirkan semangat kerja, baik religi maupun fungsi-fungsi ekonominya. Diharapkan pula, mereka dapat menjadi kritis terhadap berbagai tekanan kekuasaan sehingga dapat beranjak dari posisi mereka sebagai masyarakat yang tidak berdaya dan tidak punya kekuasaan ke arah posisi yang lebih baik. Namun,

Keberdayaan Masyarakat Peternak : Suatu Perspektif Sosiologi Berparadigma Fakta Sosial (Nugraha Setiawan)

sangat perlu disadari bahwa pengembangan masyarakat pedesaan merupakan proses yang harus dijalankan oleh masyarakatnya sendiri, serta dipadukan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan keberdayaan mereka.

Kecermatan dalam perencanaan tentu saja harus tetap diutamakan, namun tidak berarti perlu berlama-lama. Kajian komparasi dengan pembangunan di negara lain, juga perlu dilakukan, agar kita bisa lebih arif. Sebuah fenomena yang terjadi di negara Jepang yang berkaitan dengan pembangunan pertanian dan masyarakat pedesaan menunjukkan hal yang mungkin agak berbeda dengan kebanyakan negara-negara di Asia lainnya.

Perkembangan ekonomi Jepang yang sangat pesat telah berpengaruh signifikan terhadap perokomian pedesaan. Pendapatan petani meningkat dan setaraf dengan pekerja di sektor lainnya. Pendidikan anak-anak petani semakin baik, kelengkapan alat-alat rumah tangga tidak berbeda dengan mereka yang tinggal di kota, punya kendaraan, bahkan mereka memiliki waktu untuk melakukan rekreasi.

Namun demikian, akibat perkembangan ekonomi yang sangat cepat, telah terjadi ketidakseimbangan antara sektor pertanian dengan sektor yang lain. Pemerintah terlalu memfokuskan ke dalam bisnis-bisnis besar, dan pertanian bukan menjadi prioritas utama. Banyak petani yang beralih pekerjaan ke sektor non-pertanian. Persoalan lain, karena pendidikan anak-anak petani semakin bagus, tidak ada lagi yang berkeinginan menjadi petani. Sehingga dapat dikatakan, walaupun petani dan masyarakat pedesaan Jepang semakin sejahtera, yang dihadapi oleh pemerintah Jepang adalah kondisi pertanian yang menjadi semakin suram di masa depan.

Dalam konteks menempatkan petani peternak sebagai subyek pembangunan, tentu bukan seperti yang terjadi di Jepang yang diinginkan. Jika memungkinkan, para petani peternak kesejahteraannya meningkat, tetapi sektor pertanian termasuk di dalamnya sektor peternakan juga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

SIMPULAN

Masyarakat peternak dan umumnya masyarakat di pedesaan telah sejak lama bahkan hingga saat ini masih menjadi objek dan sasaran kekuasaan dari masyarakat kota maupun pranata-pranata sosial dari luar wilayah pedesaan, sehingga mereka masih terkungkung dalam kondisi tidak berdaya dalam kehidupan sosial-ekonominya. Mereka sering diposisikan sebagai sasaran kekuasaan dari masyarakat kota, ekonomi perkotaan, lembaga perdagangan kota, budaya urban, serta institusi pemerintah sebagai kepanjangan tangan dari kekuasaan birokrasi. Kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, dan prasangka, nampak sangat berpengaruh terhadap pengukuhan posisi petani peternak di pedesaan sebagai masyarakat yang tidak berdaya.

Ketidakterdayaan dan ketidakkuasaan masyarakat pedesaan juga akibat adanya kecenderungan dari penguasa untuk mempertahankan kedudukannya

dalam struktur sosial dan nilai-nilai yang mendasari kepentingannya. Misalnya, dalam pola organisasi yang bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup rakyat, sering ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan dari orang-orang, kelompok-kelompok, ataupun institusi-institusi yang terlibat di dalamnya.

Akibat adanya tekanan yang terus menerus terhadap mereka, pada akhirnya masyarakat pedesaan paling tidak memiliki dua sindrom, yaitu sindrom kemiskinan dan sindrom inersia yang saling kait mengait. Sindrom inersia tersebut antara lain berupa pasivisme, fatalisme, berorientasi ke dalam (lokalit), patuh "buta", *nrimo* dan penuh ketergantungan, merupakan gambaran yang terbentuk sebagai dampak dari adanya intervensi kekuasaan eksternal.

Rekomendasi untuk memberdayakan peternak dan masyarakat pedesaan lainnya adalah melalui kebijakan pembangunan yang menempatkan mereka sebagai subyek pembangunan, sehingga pada gilirannya diharapkan bisa mengangkatnya dari belenggu ketidakberdayaan dan kemiskinan yang selama ini melilit kehidupannya. Selain itu, dengan menempatkan petani peternak serta masyarakat pedesaan pada umumnya sebagai subyek pembangunan, pada gilirannya bisa meningkatkan keberdayaan mereka, serta lebih kritis terhadap tekanan-tekanan kekuasaan.

Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam dari para pengambil kebijakan pembangunan pedesaan terhadap aspek non-ekonomi seperti kondisi sosial budaya masyarakat pedesaan, sebab aspek sosial budaya ini berkaitan erat dengan aspek perekonomian di pedesaan. Dengan demikian, diharapkan akan lebih mempermudah upaya pemberdayaan mereka, sehingga pada akhirnya akan sangat berpotensi untuk mendukung kebijakan-kebijakan pembangunan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Jawa Barat. (2001). *Karakteristik Penduduk Jawa Barat Hasil Sensus Penduduk 2000, Seri L2.2.11.11*. Bandung: Badan Pusat Statistika Jawa Barat.

Effendi, Tadjuddin Noer. (1993). *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja, dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Hewitt, Martin. (1991). "Bio-politics and Social Policy: Foucault's Account of Welfare", dalam Mike Featherstone, Mike Hepworth, and Bryan Turner (ed.). *No Title*. London: Sage.

Kartodirdjo, Sartono. (1979). "Masyarakat Pedesaan dalam Pembangunan", *Prisma* 8(6): 3-11.

Kuntowijoyo. (1993). *Radikalisasi Petani*. Yogyakarta: Bintang Intervisi Utama.

Long, Norman. (1992). *Sosiologi Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Bina Aksara.

Keberdayaan Masyarakat Peternak : Suatu Perspektif Sosiologi Berparadigma Fakta Sosial (Nugraha Setiawan)

- Lubis, Alfian. (1990). "Kebijakan Pemerintah Bukan untuk Membina Mereka", *Prisma* 19(2): 101-106.
- Mubyarto. (1990). "Pembangunan Pertanian: Korban dari Bias Arus Utama", *Prisma*, 19(2): 98-100.
- Ritzer, George. (2004). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ritzer, George. (2005). *Contemporary Sociological Theory and Its Classical Roots*, New York: McGraw-Hill.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2005. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media
- Scott, James C. (1993). *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Scott, James C. (1994). *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Setiawan, Nugraha. (2002). "Angkatan Kerja dan Pengangguran di Pedesaan: Analisis Hasil Sakernas", *Jurnal Kependudukan* 4(1): 61-74.
- Soetrisno, Loekman. (1983). "Dinamika Masyarakat Pedesaan", *Basis* 22(5): 167-171.
- Tjondronegoro, Sediono M.P. (1990). "Revolusi Hijau dan Perubahan Sosial di Pedesaan", *Prisma*, 19(2): 3-14.
- Twikromo, Argo. (1993). "Mitos tentang Etos Kerja Masyarakat Pedesaan", *Basis* 42(10): 391-394.
- Veeger, Karel J. dkk. (1992). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Gramedia.
- Yunasaf, Unang; Nugraha Setiawan; dan Lilis Nurlina. (1998). *Hubungan Keterbukaan Petani Peternak Terhadap Nilai Kemodernan dengan Tingkat Penerapan Sistem Agribisnis*. Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran.